

**PERENCANAAN STRATEGIS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH (STUDI KASUS LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII)**

Tony Sugianto

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
tetsu.aoyama.77@gmail.com

M. Kendry Widiyanto

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
kenronggo@untag-sby.ac.id

Yusuf Hariyoko

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
yusufhari@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The development of an Integrity Zone (ZI) is an essential step in realizing a Corruption-Free Area (WBK) and a Clean and Serving Bureaucracy Area (WBBM) in government agencies. This study aims to determine the strategic planning for the development of an Integrity Zone within the Higher Education Service Institution (LLDIKTI) Region VII in order to realize a bureaucracy that is more open, innovative, transparent, and oriented towards good public service. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used the interactive model of Miles and Huberman. The results of the study indicate that there are four main stakeholders who play a role in the development of ZI in LLDIKTI Region VII, namely the Head of LLDIKTI Region VII, Head of General Affairs, Head of the Integrity Zone Team, and Employees. Based on stakeholder analysis, the Head of LLDIKTI Region VII and the Head of the Integrity Zone Team are in the Key Players category because they have a high level of interest and influence. The Head of General Affairs is in the Subject category (high interest, limited influence), while Employees are in the Crowd category. Role analysis shows that the Head of LLDIKTI acts as a decision maker, the Head of General Affairs as a coordinator, the ZI Team Leader as an implementer, and employees as supporting actors. The study's conclusions confirm that the success of Integrity Zone development is greatly influenced by effective stakeholder synergy and management.

Keywords: *Strategic Planning, Integrity Zone, Stakeholder Analysis, Bureaucratic Reform*

ABSTRAK

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan langkah esensial dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan strategis pembangunan Zona Integritas di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII guna mewujudkan birokrasi yang lebih terbuka, inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat stakeholder utama yang berperan dalam pembangunan ZI di LLDIKTI Wilayah VII, yaitu Kepala LLDIKTI Wilayah VII, Kepala Bagian Umum, Ketua Tim Zona Integritas, dan Pegawai. Berdasarkan stakeholder analysis, Kepala LLDIKTI Wilayah VII dan Ketua Tim Zona Integritas berada pada kategori Key Players karena memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Kepala Bagian Umum berada dalam kategori Subject (kepentingan tinggi, pengaruh terbatas), sedangkan Pegawai berada pada kategori Crowd. Analisis peran menunjukkan Kepala LLDIKTI berperan sebagai Decision Maker, Kepala Bagian Umum sebagai Coordinator, Ketua Tim ZI sebagai Implementer, dan Pegawai sebagai Supporting Actor. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat dipengaruhi oleh sinergi dan pengelolaan stakeholder yang efektif.

Kata Kunci: *Perencanaan Strategis, Zona Integritas, Stakeholder Analysis, Reformasi Birokrasi*

A. PENDAHULUAN

Teori reformasi birokrasi sangat relevan dalam konteks pembangunan Zona Integritas (ZI). ZI merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021, unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik pada komponen pengungkit dan komponen hasil akan dianugerahi predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hubungan reformasi birokrasi dengan ZI mencakup beberapa prinsip utama, antara lain penguatan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan, inovasi teknologi (seperti penerapan *Whistle Blowing System* atau WBS), partisipasi publik, pembangunan budaya antikorupsi, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Melalui pilar-pilar tersebut, pembangunan ZI diharapkan dapat memotong proses bisnis pelayanan yang lambat dan berbelit-belit.

Sebagai instansi yang memainkan peran vital dalam pengelolaan, pengawasan, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di Jawa Timur, Lembaga

Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII dituntut untuk memperkuat tata kelola kelembagaannya. Perencanaan strategis pembangunan ZI di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII mengacu pada agenda kebijakan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menitikberatkan pada stabilitas, transparansi, dan reformasi birokrasi demi peningkatan kualitas SDM.

Namun, dalam pelaksanaannya, pencapaian komitmen ini kerap menghadapi hambatan nyata seperti resistensi internal terhadap perubahan dan keterbatasan kapasitas institusi. Oleh karena itu, pembangunan ZI tidak dapat dijalankan secara administratif semata, melainkan membutuhkan pembentukan tim kerja yang jelas, penyusunan rencana prioritas yang terukur, serta identifikasi peran seluruh aktor organisasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: *"Bagaimana perencanaan strategis pembangunan Zona Integritas di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII?"*

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Fokus penelitian ini diarahkan pada *stakeholder analysis* dan *stakeholder role analysis* internal dalam mendukung keberhasilan implementasi enam area perubahan pembangunan Zona Integritas. Lokasi penelitian bertempat di Kantor LLDIKTI Wilayah VII yang berlokasi di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam mendetail bersama narasumber kunci, yaitu Kepala LLDIKTI Wilayah VII, Kepala Bagian Umum, dan Ketua Zona Integritas. Data sekunder didapatkan melalui observasi lapangan nonpartisipan serta dokumentasi berupa laporan, lembar kerja evaluasi, dan dokumen hukum organisasi yang relevan.

Teknik analisis data mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman yang berjalan secara siklis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Pemetaan aktor dilakukan dengan instrumen Matriks *Interest-Influence* untuk membagi posisi aktor ke dalam empat kuadran (*Key Players*, *Subjects*, *Context Setters*, dan *Crowd*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Pemetaan Matriks *Interest-Influence* Stakeholder

Berdasarkan hasil pengumpulan data empiris dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII, teridentifikasi empat pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan jalannya program. Para aktor tersebut adalah Kepala LLDIKTI Wilayah VII, Kepala Bagian Umum, Ketua Tim Zona Integritas, dan Pegawai. Keempat pihak ini kemudian dipetakan menggunakan instrumen Matriks *Interest-Influence* (Kepentingan-Pengaruh) untuk memahami kuadran posisi strategis masing-masing, yang menjadi landasan krusial dalam menentukan arah keterlibatan mereka pada perencanaan

pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hasil pemetaan kuadran menunjukkan bahwa Kepala LLDIKTI Wilayah VII dan Ketua Tim Zona Integritas berada pada kategori *Key Players* (Aktor Kunci). Keduanya diklasifikasikan ke dalam kuadran ini karena memiliki tingkat kepentingan sekaligus tingkat pengaruh yang sangat tinggi dalam menentukan keberhasilan implementasi program di lembaga. Sebagai pimpinan tertinggi, Kepala LLDIKTI Wilayah VII memiliki otoritas penuh dalam menetapkan kebijakan organisasi dan realokasi anggaran, sedangkan Ketua Tim Zona Integritas memegang pengaruh besar dalam mengendalikan pelaksanaan teknis operasional serta memastikan terpenuhinya indikator pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Sementara itu, Kepala Bagian Umum menempati kategori *Subjects*, yang berarti memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap keberhasilan Zona Integritas namun memiliki pengaruh yang lebih terbatas dibandingkan aktor kunci karena tidak memegang kewenangan mutlak dalam pengambilan keputusan strategis. Pada kuadran lainnya, Pegawai LLDIKTI Wilayah VII berada pada kategori *Crowd*, di mana secara kolektif mereka memiliki pengaruh dan kepentingan yang berada pada tingkat sedang dalam ranah perumusan kebijakan strategis. Meski demikian, keterlibatan pegawai tetap bernilai penting karena mereka adalah eksekutor harian budaya kerja di lapangan. Menariknya, penelitian ini tidak menemukan adanya pemangku kepentingan yang masuk dalam kategori *Context Setters*, yang menandakan terjadinya keselarasan arah organisasi di LLDIKTI Wilayah VII karena seluruh pihak yang memiliki pengaruh besar secara otomatis juga menaruh kepentingan yang tinggi pada kesuksesan program ini.

Analisis Peran Stakeholder (Stakeholder Role Analysis)

Sinergi kelembagaan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif di LLDIKTI Wilayah VII terbentuk melalui pembagian peran yang terstruktur dan saling melengkapi di antara para aktor. Berdasarkan *stakeholder role analysis*, Kepala LLDIKTI Wilayah VII menjalankan peran sebagai *Decision Maker* (Pengambil Keputusan). Dalam peran ini, pimpinan tertinggi memegang tanggung jawab penuh dalam menentukan visi, arah strategis, pengesahan dokumen rencana kerja, serta memberikan keteladanan komitmen secara formal guna meminimalisasi potensi resistensi perubahan dari dalam organisasi. Selanjutnya, Kepala Bagian Umum mengemban peran sebagai *Coordinator* (Koordinator) yang bertugas menyelaraskan tata laksana administrasi, dukungan anggaran, pengelolaan kepegawaian, serta fasilitasi sarana prasarana yang diperlukan lintas unit kerja.

Di tingkat eksekusi program, Ketua Tim Zona Integritas memegang peran vital sebagai *Implementer* (Pelaksana). Peran pelaksana ini diwujudkan melalui tanggung jawab teknis dalam menyusun program kerja pada enam area perubahan, memantau kemajuan berkala, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan agar program berjalan sesuai target waktu yang ditetapkan. Terakhir, seluruh staf dan Pegawai LLDIKTI Wilayah VII menempati peran sebagai *Supporting Actor* (Aktor Pendukung). Pegawai bertindak sebagai ujung tombak organisasi yang menerapkan nilai-nilai antikorupsi, profesionalisme, dan integritas secara nyata dalam aktivitas kedinasan harian serta saat memberikan pelayanan publik langsung kepada masyarakat maupun perguruan tinggi swasta di Jawa

Timur. Kejelasan pembagian peran ini terbukti meminimalkan terjadinya tumpang tindih tugas di internal lembaga.

Perencanaan Strategis Pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Analisis Stakeholder

Kombinasi komprehensif dari hasil analisis pemetaan matriks dan analisis peran melahirkan beberapa rumusan strategi perencanaan yang sistematis untuk mendukung keberhasilan Zona Integritas di LLDIKTI Wilayah VII. Strategi pertama difokuskan pada penguatan komitmen pimpinan (*Key Player*) sebagai motor utama perubahan budaya kerja organisasi yang berkelanjutan. Strategi kedua adalah mengoptimalkan koordinasi organisasi yang diakomodasi oleh Kepala Bagian Umum (*Coordinator*) guna memperlancar integrasi data dan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk penguatan sistem pengawasan internal seperti *Whistle Blowing System* (WBS).

Strategi ketiga diarahkan pada peningkatan kapasitas teknis Tim Zona Integritas (*Implementer*) melalui bimbingan teknis yang berkelanjutan agar proses pemantauan kemajuan tidak sekadar berfokus pada formalitas pemenuhan dokumen administratif semata. Strategi keempat difokuskan pada peningkatan partisipasi aktif pegawai (*Supporting Actor*) melalui internalisasi nilai-nilai kerja secara masif, sosialisasi berkala, serta penyediaan ruang umpan balik yang transparan. Dengan menerapkan jalinan strategi yang mengintegrasikan seluruh peran pemangku kepentingan internal ini, LLDIKTI Wilayah VII dapat membangun tata kelola birokrasi yang bersih, akuntabel, inovatif, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik yang berkualitas tinggi.

D. PENUTUP

Perencanaan strategis pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII ditopang oleh koordinasi kolaboratif empat kelompok *stakeholder* internal, yaitu Kepala LLDIKTI, Kepala Bagian Umum, Ketua Tim ZI, dan Pegawai. Keberhasilan pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan manajemen *stakeholder* tersebut. Melalui pembagian peran yang jelas—Kepala LLDIKTI sebagai *Decision Maker*, Kepala Bagian Umum sebagai *Coordinator*, Ketua Tim ZI sebagai *Implementer*, dan Pegawai sebagai *Supporting Actor*—perencanaan strategis dapat berjalan secara terarah, terintegrasi, serta tidak terjebak dalam pemenuhan dokumen administratif semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, R., Linda, R., Shafira, M., & Riani, S. (2020). *Rahmad Purwanto Widiyastomo*.
- Artikel DJKN. (2021). Pembangunan Zona Integritas KPKNL Bekasi: Suatu Proses, Tantangan, dan Strategi Menuju ZI WBK/WBBM. *Artikel DJKN*.
- Biahimo, J., Mustapa Wantu, S., Aneta, Y., & Sulila, I. (2025). Transformasi Zona Integritas Menuju Birokrasi Bebas Korupsi : Tinjauan Kebijakan dan Strategi Implementasi di Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Jurnal ISO*:

- Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 14.
<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2288>
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*. Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=xqVFDwAAQBAJ>
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. ABC-Clio. <https://books.google.co.id/books?id=q96ltAEACAAJ>
- David, F. R. (2011). *Strategic Management: Concepts and Cases*. Pearson Education. <https://books.google.co.id/books?id=ot3MQgAACAAJ>
- Edwin.ibnu. (2025). Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. *SmartID*.
- Fatkurohmah, S.Pd., M. P. (2024). Rencana strategis penelitian rencana strategis penelitian 2020-2024. *Rencana Strategis 2020-2024*, 52.
- Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro. (1977). *Modern Public Administration* (6th ed.). New York : Happer & Row.
- Hafizhah Zahro' Rohimah, Abdul Basith, M. A. N. (2025). Strategi Humas dalam Mewujudkan Transparansi Publik Menuju Madrasah Zona Integritas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Halidu, O. B., Awuah-Gyawu, M., Otchere Fianko, A., Gyamfi, B. A., & Asongu, S. A. (2025). Corporate governance and circular supply chains: Synergizing eco-adaptive organizational culture, leadership eco-innovation willingness, and perceived urgency for circularity. *Journal of Environmental Management*, 392(July), 126689. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.126689>
- Harbani, P. (2007). *Teori Administrasi Publik*, Bandung, CV. Alfa Beta.
- Henry, N. (2018). *Public Administration and Public Affairs*. Routledge, Taylor & Francis Group. <https://books.google.co.id/books?id=6qjrAQAAACAAJ>
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1994). Data management and analysis methods. In *Handbook of qualitative research*. (pp. 428–444). Sage Publications, Inc.
- Kampus, M., & Berdampak, T. D. A. N. (n.d.). *Membangun kampus transformatif dan berdampak*.
- Kareth, F. R. (2023). *Strategi Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Politeknik STIA LAN Jakarta.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam dimensi strategis administrasi publik: konsep, teori dan isu*. Gava Media. <https://books.google.co.id/books?id=ApyjtgAACAAJ>
- Kerja, D. R., Bebas, W., Korupsi, D., Dan, W. B. K., Bersih, B., Melayani, D. A. N., Btklpp, W., Batam, K. I., & Kerja, T. I. M. (2020). *(Dokumen Rencana Kerja PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)BTKLPP KELAS I BATAM. 2020*.

- Learning, O. (2024). *A Guide To Strategic Management Theories*. Omniplex Learning.
- Makhdom, H., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2024). Strategi Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK Melalui Pembangunan Zona Integritas. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 5(3), 274–281. <https://doi.org/10.46730/japs.v5i3.186>
- Memorization, Q. U. R. A. (2026). *Professional and spiritual practices in sustaining mutqin qur'anic memorization. x*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Sage. https://books.google.co.id/books?id=O3WZL-33_zYC
- Mintzberg, H. (1994). The fall and rise of strategic planning. *Harvard Business Review*.
- Niamy, M. F. (2024). Analisis Teori dan Konsep Perencanaan Pembangunan: Studi Kasus pada Negara Berkembang. *Jurnal Sahmiyya*, 3(2), pp.339.
- Ombudsmen RI. (n.d.). *Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)*. Ombudsmen RI.
- PANRB, K. (2021). Permenpanrb Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. *Implementation Science*, 52(1), 1–49. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature10402%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature21059%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577%0Ahttp://>
- Pendidikan, M., Agamai, M., & Negeri, M. D. (2025). *Htt Ps : / W Ww Na Mu Lya Na . Co / in Pre Nta Ng Na Mu / W Ww Lya Htt Ps : . Co / in Pre S Tan Ml*.
- Perreault, K. (2011). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. *Manual Therapy*, 16(1), 103. <https://doi.org/10.1016/j.math.2010.09.003>
- Pratama, R. I., Sari, S. M., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2025). *Birokrasi Bersih Melayani Di Kppn Sidoarjo. 11*, 81–91.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title 濟無No Title No Title No Title*. 2(1), 306–312.
- Siagian, S. P. (2008). *Administrasi pembangunan: konsep, dimensi dan strateginya* (13th ed.). Jakarta: Haji Masagung.
- Sirin, A. (2021). Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. *Edutrained: Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan*, 5(2), 148–163.
- Solaymani, S., & Montes, O. (2024). The role of financial development and good governance in economic growth and environmental sustainability. *Energy Nexus*, 13(September 2023), 100268. <https://doi.org/10.1016/j.nexus.2023.100268>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*.
- Tadaki, M. (2020). Is there space for politics in the environmental bureaucracy?

- Discretion and constraint in Aotearoa New Zealand's Ministry for the Environment. *Geoforum*, 111(January 2019), 229–238. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.02.021>
- Tadaki, M., & Harrison, J. L. (2025). Critical geographies of discretion in the environmental bureaucracy. *Progress in Environmental Geography*, 4(3), 277–297. <https://doi.org/10.1177/27539687251362248>
- Tribatanewsbantul. (2019). *Komponen Pembangunan Zona Integritas*. Tribatanewsbantul.
- White, L. D. (1926). *Introduction to the Study of Public Administration*. Macmillan. <https://books.google.co.id/books?id=b5AFAAAAMAAJ>
- Wihardiasty Sekar Kinasih, W. S. K., & Sujianto, S. (2022). Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 104–120. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9308](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9308)
- Wilson, W. (1887). The Study of Administration. *Political Science Quarterly*, 2(2), 197–222. <https://doi.org/10.2307/2139277>
- Yeremias T. Keban. (2014). *Enam dimensi strategis administrasi publik : konsep, teori dan isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Yusuf Tojiri, M. M., Putra, H. S., & Nur Faliza, S. E. (2023). *Dasar Metodologi Penelitian: Teori, Desain, dan Analisis Data*. Takaza Innovatix Labs.